



## WALI KOTA PAGAR ALAM

---

### PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 0.6 TAHUN 2010

#### TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

#### WALI KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, Pemerintah Kota Pagalar Alam wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
11. Peraturan Presiden.....

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 seri D)
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 seri D)

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

#### **Pasal 1**

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dengan rincian sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 2.....

## Pasal 2

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam 2008-2013.

## Pasal 3


Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota Pagar Alam, Inspektorat Kota Pagar Alam diberikan tugas :

- a. Melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam setiap tahun.
- b. Minimal 3 bulan sekali, melakukan pemantauan capaian kinerja masing-masing kegiatan pada SKPD.

## Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam berita daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

 Pada tanggal 27 Februari 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

 dto

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 27 Februari 2010  
SEKRETARIS DAERAH, AM  
KOTA PAGAR ALAM

H. DJAZULI KURIS

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

ANUN 2010 NOMOR.06.SERI .....

Lampiran :

Peraturan Walikota Pagar Alam

Nomor : 06 Tahun 2010

Tanggal : 27 Februari 2010

- 1 Nama Organisasi : Kota Pagar Alam
- 2 Tugas : Melaksanakan Pagar Alam sebagai Kota Agribisnis dan Pariwisata bermuansa Islami
- 3 Fungsi :
  1. Mengembangkan Kualitas sumberdaya manusia sekaligus memelihara serta mengembangkan suasana kehidupan keagamaan yang dinamis.
  2. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik sesuai dengan konsep *good governance*
  3. Membangun dan meningkatkan sektor perdagangan dan jasa
  4. Meningkatkan pembangunan sektor agribisnis
  5. Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata
  6. Meningkatkan pembangunan sektor infrastruktur

#### 4. Indikator Kinerja

No.	Urusan/Sasaran	IKU	Alasan	Satuan Ukuran
I	<b>Pendidikan</b>			
1.	Meningkatnya jumlah kebijakan pendidikan yang diterbitkan dalam setahun	• Jumlah kebijakan bidang pendidikan yang diterbitkan dalam setahun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan	bh
2.	Meningkatnya APK Pendidikan	• APK Pendidikan tahun tertentu	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan perluasan akses	%
3.	Meningkatnya APM Pendidikan	• APM Pendidikan tahun tertentu	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan perluasan akses	%
4.	Meningkatnya angka lulusan pendidikan minimal sampai tingkat SLTA	• Prosentase kelulusan siswa SD/MI • Prosentase kelulusan siswa SMP/MTs • Prosentase kelulusan siswa Sekolah Menengah	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan mutu SD/MI Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan mutu SMP/MTs Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan mutu Sekolah Menengah	% % %

5	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan minimal sampai tingkat SLTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata-rata nilai UAN SD/MI</li> <li>• Rata-rata nilai UAN SMP/MTs</li> <li>• Rata-rata nilai UAN Sekolah Menengah</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan mutu SD/MI	nilai
6	Terwujudnya pendidikan gratis bagi masyarakat dari tingkat SD sampai dengan SLTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio siswa mendapat gratis biaya pendidikan SD/MI terhadap total siswa SD/MI</li> <li>• Rasio siswa mendapat gratis biaya pendidikan SMP/MTs terhadap total siswa SMP/MTs</li> <li>• Rasio siswa mendapat gratis biaya pendidikan menengah terhadap total siswa menengah</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan mutu SMP/MTs	nilai
7	Berkurangnya angka putus sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka DO pendidikan SD/MI</li> <li>• Angka DO pendidikan SMP/MTs</li> <li>• Angka DO pendidikan menengah</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan mutu Sekolah Menengah	nilai
8	Meningkatnya efisiensi pengelolaan sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyaknya sekolah yang melaksanakan MPMBs</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam pembiayaan pendidikan SD/MI	..../....
9	Meningkatnya relevansi lulusan sekolah dengan lapangan pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase lulusan terserap tenaga kerja</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan efisiensi	..../....
10	Tersedianya rasio jumlah tenaga pengajar yang ideal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio jumlah tenaga pengajar terhadap siswa.</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan mutu SMP/MTs	..../....
11	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang ideal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio ruang kelas terhadap siswa.</li> <li>• Rasio ruang laboratorium terhadap sekolah</li> <li>• Rasio ruang perpustakaan terhadap sekolah</li> <li>• Rasio buku terhadap siswa.</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan mutu SMP/MTs	..../....
<b>II. Kesehatan</b>			Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan mutu SMP/MTs	..../....
1.	Meningkatnya jumlah kebijakan bidang kesehatan yang diterbitkan dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kebijakan bidang kesehatan yang diterbitkan dalam setahun</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan efisiensi	..../....
2.	Meningkatnya Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang tersedia</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan relevansi	..../....
3.	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan KK Miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan Pelayanan Kesehatan KK Miskin</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan penyediaan tenaga pengajar	..../....
			Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan penyediaan ruang kelas	..../....
			Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan penyediaan ruang laboratorium	..../....
			Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan penyediaan perpustakaan	..../....
			Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan penyediaan buku	..../....
			Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan	buah
			Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jenis
			Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait Pelayanan Kesehatan KK Miskin	%

4.	Terimplementasinya pembangunan fisik dan non fisik berdimensi kesehatan dan ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio tempat umum memenuhi persyaratan kesehatan terhadap total tempat umum</li> <li>• Prosentase Gizi buruk pada anak</li> <li>• Angka kematian bayi setahun</li> <li>• Angka kematian ibu hamil melahirkan</li> <li>• Angka harapan hidup (AHH)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait penyediaan tempat umum memenuhi persyaratan kesehatan</li> </ul>	..../....
5	Menurunnya Gizi buruk pada anak	• Prosentase Gizi buruk pada anak	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan penurunan Gizi buruk pada anak	%
6	Menurunnya angka kematian bayi dan ibu hamil melahirkan.	• Angka kematian bayi setahun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan penurunan kematian bayi	angka
7	Meningkatnya angka harapan hidup (AHH)	• Angka kematian ibu hamil melahirkan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan penurunan kematian ibu	angka
8	Adanya dukungan dari berbagai organisasi dan berbagai sektor dalam pembangunan kesehatan di Kota Pagar Alam.	• Angka harapan hidup (AHH)	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan peningkatan angka harapan hidup	angka
9	Tersedianya rasio jumlah tenaga medis yang ideal dengan sebaran penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio organisasi yang aktif dari berbagai sektor dalam pembangunan kesehatan di Kota Pagar Alam terhadap total organisasi.</li> <li>• Rasio tenaga medis yang ideal terhadap total sebaran penduduk.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan peningkatan organisasi yang aktif dari berbagai sektor dalam pembangunan kesehatan di Kota Pagar Alam</li> <li>• Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan penyediaan tenaga medis</li> </ul>	..../....
10	Tumbuhnya kesadaran akan perilaku hidup sehat di kalangan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio kepemilikan MCK terhadap total KK</li> <li>• Rasio kepemilikan Toga terhadap total KK</li> <li>• Rasio kepemilikan sumber air bersih yang memenuhi kesehatan terhadap total KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan pemasyarakatan MCK</li> <li>• Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan pemasyarakatan Toga</li> <li>• Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan pemasyarakatan kepemilikan sumber air bersih</li> </ul>	..../....
11	Terdeteksinya secara dini penyakit menular dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penyakit menular dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya yang terdeteksi secara dini dalam setahun.</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait kemampuan mendeteksi dini penyakit	buah
12	Tersedianya pemerataan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan sebaran penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penyakit menular dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya yang terdeteksi secara dini dalam setahun.</li> <li>• Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk.</li> <li>• Rasio Pustu terhadap jumlah penduduk</li> <li>• Rasio Posyandu terhadap jumlah desa/kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait kemampuan mendeteksi dini penyakit menular dan berbahaya</li> <li>• Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan penyediaan Puskesmas</li> <li>• Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan penyediaan Puskesmas pembantu</li> <li>• Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan penyediaan Posyandu</li> </ul>	jenis ..../.... ..../.... ..../....
III.	<b>Pekerjaan Umum</b>			
1	Tersedianya kebijakan bidang Pekerjaan Umum	• Jumlah kebijakan bidang Pekerjaan Umum	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum	bh

2	Tersedianya infrastruktur yang layak dan memadai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio infrastruktur yang layak dan memadai terhadap total infrastruktur.</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum terkait dengan penyediaan infrastruktur yang layak dan memadai	.../....
3.	Meningkatnya Jumlah fasum yang terbangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah fasum yang terbangun</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum terkait dengan pembangunan fasum	bh
4.	Meningkatnya Panjang jalan dibangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panjang jalan dibangun</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum terkait dengan pembangunan jalan	km
5	Meningkatnya Panjang jalan direhab	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panjang jalan direhab</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum terkait dengan rehabilitasi jalan	km
6	Meningkatnya Panjang irigasi dibangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panjang irigasi di bangun</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum terkait dengan pembangunan irigasi	m
7	Meningkatnya Panjang irigasi direhab	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panjang irigasi direhab</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum terkait dengan rehabilitasi irigasi	m
8	Meningkatnya Panjang Jembatan dibangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panjang Jembatan dibangun</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum terkait dengan pembangunan jembatan	m
9	Meningkatnya Panjang Jembatan direhab	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panjang Jembatan direhab</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum terkait dengan rehabilitasi irigasi jembatan	m
10	Tersedianya sistem air bersih yang mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Pagar Alam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio ketersediaan air bersih terhadap kebutuhan masyarakat Pagar Alam.</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum terkait dengan ketersediaan air bersih	.../....
11	Meningkatnya jumlah dokumen data/informasi untuk perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum yang tersedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah data/informasi untuk perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum yang tersedia</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam menyajikan data/informasi untuk perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum yang tersedia	buah
<b>IV</b>	<b>Perumahan</b>			
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kebijakan dalam urusan perumahan</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perumahan	bh
<b>V</b>	<b>Tata Ruang</b>			
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kebijakan dalam urusan Tata Ruang</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Tata Ruang	bh
2	Optimalnya penataan ruang perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio bangunan yang tertata terhadap total bangunan yang ada</li> <li>Rasio ruang kota yang tertata terhadap total bangunan ruang kota yang ada</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Tata Ruang terkait dengan penataan bangunan Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Tata Ruang terkait dengan penataan ruang/zonasi	.../.... .../....





3	Meningkatnya jumlah dokumen data/informasi untuk perencanaan pembangunan di bidang tata guna tanah yang tersedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah data/informasi untuk perencanaan pembangunan di bidang tata guna tanah yang tersedia</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam menyiapkan data/informasi untuk perencanaan pembangunan di bidang tata guna tanah	bh
<b>X</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>			
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kebijakan dalam urusan Kependudukan dan Catatan Sipil</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kependudukan dan catatan sipil	bh
2	Meningkatnya Jumlah penduduk yang memiliki akta cacatan sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penduduk yang memiliki akta cacatan sipil</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kependudukan dan catatan sipil terkait dengan kepemilikan akta	or
<b>XI</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kebijakan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	bh
<b>XII</b>	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>			
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kebijakan dalam urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	bh
<b>XIII</b>	<b>Sosial</b>			
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kebijakan dalam urusan Sosial</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Sosial	bh
<b>XIV</b>	<b>Tenaga Kerja</b>			
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kebijakan dalam urusan Tenaga Kerja</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Tenaga Kerja	bh
2	Berkurangnya tingkat pengangguran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Angka pengangguran.</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Tenaga Kerja terkait dengan penurunan pengangguran	angka
<b>XV</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>			
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kebijakan dalam urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	bh
2	Meningkatnya jumlah KUKM Agribisnis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penambahan KUKM Agribisnis dalam setahun</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan pembinaan UMKM	bh
3	Meningkatnya komposisi wiraswasta dibandingkan PNS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio wiraswasta dibandingkan PNS.</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan peningkatan akses wira usaha	.....

4	Meningkatnya Jumlah koperasi sehat	Jumlah koperasi sehat	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan kesehatan Koperasi	bh
<b>XVI Penanaman Modal</b>				
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Penanaman Modal	Jumlah kebijakan dalam urusan Penanaman Modal	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Penanaman Modal	bh
2	Meningkatnya Jumlah potensi investasi yang terekspos tingkat nasional	Jumlah potensi investasi yang terekspos tingkat nasional	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Penanaman Modal terkait dengan ekspos potensi investasi	bh
3	Masuknya modal/ industri dari investor luar dan dalam daerah	Jumlah modal/ industri dari investor luar dan dalam daerah yang masuk	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Penanaman Modal terkait dengan peningkatan modal/ industri dari investor luar dan dalam daerah yang masuk	Rp
4	Terwujudnya pelayanan yang responsif, akuntabel dan bertanggung jawab.	Rasio ijin yang diterbitkan terhadap permohonan dalam setahun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Penanaman Modal terkait dengan ekspos potensi investasi	.../....
5	Menurunnya Frekuensi pungutan liar pada penerbitan ijin dalam setahun	Frekuensi pungutan liar pada penerbitan ijin dalam setahun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Penanaman Modal terkait dengan penghapusan pungutan liar	kali
<b>XVII Kebudayaan</b>				
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Kebudayaan	Jumlah kebijakan dalam urusan Kebudayaan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kebudayaan	buah
2	Meningkatnya Jumlah aset budaya terdata	Jumlah aset budaya terdata	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kebudayaan terkait dengan pendataan aset budaya	buah
3	Meningkatnya jumlah dokumen kajian bidang sosbud yang diterbitkan	Jumlah kajian bidang sosbud yang diterbitkan	Mengukur kinerja organisasi kajian bidang sosbud	buah
4	Berkembangnya nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat yang disertai ketaatan terhadap ajaran agamanya.	Frekuensi pesantren kilat dalam setahun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kebudayaan dalam mendukung pesantren kilat	kali
5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana peribadatan.	Frekuensi MTQ dalam setahun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kebudayaan dalam mendukung MTQ	kali
<b>XVIII Pemuda dan Olahraga</b>				
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Pemuda dan Olahraga	Jumlah kebijakan dalam urusan Pemuda dan Olahraga	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemuda dan Olahraga	buah
2	Meningkatnya Jumlah pemuda putus sekolah yang terbina	Jumlah pemuda putus sekolah yang terbina	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemuda dan Olahraga terkait pembinaan pemuda	or
3	Meningkatnya Jumlah kejuaraan yang dimenangkan minimal tingkat provinsi	Jumlah kejuaraan yang dimenangkan minimal tingkat provinsi	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemuda dan Olahraga terkait dengan prestasi olahraga	bh

<b>XIX</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>				
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kebijakan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	buah	
<b>XX</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>				
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kebijakan dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	bh	
2	Rasionalisasi struktur birokrasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio jabatan struktur dalam organisasi perangkat daerah terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Otonomi Daerah terkait dengan jabatan struktur dalam organisasi perangkat daerah terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan	.../....	
3	Penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio aparatur yang sesuai dengan kompetensi terhadap total pegawai</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Otonomi Daerah terkait dengan peningkatan kualitas pegawai	.../....	
4	Terwujudnya aparatur yang profesional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio aparatur yang memiliki kualifikasi keterampilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi terhadap total pegawai</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Otonomi Daerah terkait dengan peningkatan kualitas pegawai	.../....	
5	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio pegawai yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang tepat terhadap total pegawai</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Otonomi Daerah terkait dengan efisiensi penempatan pegawai	.../....	
6	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada kepentingan publik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frekuensi keluhan masyarakat terhadap layanan publik</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Otonomi Daerah terkait dengan pengurangan keluhan masyarakat terhadap layanan publik	kali	
7	Tersedianya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Otonomi Daerah terkait dengan layanan publik	IKK	
<b>XXI</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>				
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kebijakan dalam urusan Pangan</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pangan	buah	
2	Tersedianya pupuk organik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio ketersediaan pupuk organik untuk ketahanan pangan terhadap kebutuhan</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pangan terkait pupuk organik	buah	
3	Meningkatnya Jenis pangan alternatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Jenis pangan alternatif yang dimanfaatkan oleh masyarakat</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pangan terkait Jenis pangan alternatif yang dimanfaatkan oleh masyarakat	jenis	

<b>XXII</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah kebijakan dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	• Jumlah kebijakan dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	buah	
2	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Angka penduduk miskin dalam setahun	• Angka penduduk miskin dalam setahun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan penurunan Angka penduduk miskin	angka	
<b>XXIII</b>	<b>Statistik</b>					
1	Meningkatnya jumlah kebijakan dalam urusan Statistik yang diterbitkan dalam setahun	Jumlah kebijakan dalam urusan Statistik yang diterbitkan dalam setahun	• Jumlah kebijakan dalam urusan Statistik yang diterbitkan dalam setahun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Statistik	buah	
2	Meningkatnya jumlah dokumen data statistik untuk perencanaan pembangunan yang tersedia	Jumlah data statistik untuk perencanaan pembangunan yang tersedia	• Jumlah data statistik untuk perencanaan pembangunan yang tersedia	Mengukur kinerja organisasi dalam menyiapkan data/informasi/ statistik untuk perencanaan pembangunan yang tersedia	buah	
<b>XXIV</b>	<b>Kearsipan</b>					
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Kearsipan yang diterbitkan dalam setahun	Jumlah kebijakan dalam urusan Kearsipan yang diterbitkan dalam setahun	• Jumlah kebijakan dalam urusan Kearsipan yang diterbitkan dalam setahun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kearsipan	buah	
2	Meningkatnya Jumlah arsip aktif yang terselamatkan	Jumlah arsip aktif yang terselamatkan	• Jumlah arsip aktif yang terselamatkan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kearsipan terkait dengan penyelamatan arsip aktif	buah	
3	Meningkatnya Jumlah arsip inaktif yang terselamatkan	Jumlah arsip inaktif yang terselamatkan	• Jumlah arsip inaktif yang terselamatkan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kearsipan terkait dengan penyelamatan arsip inaktif	buah	
<b>XXV</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>					
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Komunikasi dan Informatika yang diterbitkan dalam setahun	Jumlah kebijakan dalam urusan Komunikasi dan Informatika yang diterbitkan dalam setahun	• Jumlah kebijakan dalam urusan Komunikasi dan Informatika yang diterbitkan dalam setahun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Komunikasi dan Informatika	buah	
2	Tenwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat.	Jumlah media informasi Pemerintah Kota yang dapat diakses oleh masyarakat dalam setahun.	Jumlah media informasi Pemerintah Kota yang dapat diakses oleh masyarakat dalam setahun.	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Komunikasi dan Informatika terkait dengan penyebaran informasi	buah	
<b>XXVI</b>	<b>Perpustakaan</b>					
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Perpustakaan	Jumlah kebijakan dalam urusan Perpustakaan	• Jumlah kebijakan dalam urusan Perpustakaan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perpustakaan	buah	
2	Meningkatnya Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	• Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perpustakaan terkait dengan sosialisasi minat baca	buah	
3	Meningkatnya Jumlah buku referensi	Jumlah buku referensi	• Jumlah buku referensi	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perpustakaan terkait dengan peningkatan jumlah buku referensi	buah	

4	Meningkatnya Jumlah perpustakaan kelurahan	Jumlah perpustakaan kelurahan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perpustakaan terkait dengan peningkatan jumlah perpustakaan di kelurahan	buah
<b>XXVII</b>	<b>Pertanian</b>			
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Pertanian	Jumlah kebijakan dalam urusan Pertanian	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pertanian	buah
2	Meningkatnya dukungan regulasi, riset dan teknologi di sektor agribisnis.	Frekuensi kajian di sektor agribisnis dalam setahun.	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pertanian terkait pengembangan sektor agribisnis	kali
3	Tersedianya SDM yang berkualitas di sektor agribisnis.	Rasio SDM yang terampil di sektor agribisnis terhadap total SDM	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pertanian terkait pengembangan SDM sektor agribisnis	.../....
4	Tersedianya benih perkebunan	Rasio ketersediaan benih perkebunan terhadap kebutuhan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pertanian terkait Tersedianya benih perkebunan	.../....
5	Tersedianya HMT	Rasio ketersediaan HMT terhadap kebutuhan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pertanian terkait penyediaan HMT	.../....
6	Terlaksananya IB	Rasio ketersediaan IB terhadap kebutuhan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pertanian terkait pelaksanaan IB	.../....
7	Optimalnya fungsi jaringan irigasi	Rasio jaringan irigasi yang berfungsi baik terhadap total jaringan	Mengukur kinerja organisasi dalam penyediaan jaringan irigasi	.../....
<b>XXVIII</b>	<b>Kehutanan</b>			
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Kehutanan	Jumlah kebijakan dalam urusan Kehutanan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kehutanan	buah
2	Menurunnya hutan yang rusak akibat perambahan	Rasio hutan yang rusak terhadap total hutan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kehutanan terkait dengan penurunan hutan yang rusak	.../....
3	Meningkatnya jumlah penanaman pohon	Jumlah pohon yang ditanam setiap tahun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kehutanan terkait penanaman pohon	pohon
4	Meningkatnya patroli pengamanan hutan	Jumlah patroli pengamanan hutan setahun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kehutanan terkait dengan pengamanan hutan	kali
<b>XXIX</b>	<b>Energi dan Sumberdaya mineral</b>			
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Energi dan sumber Daya mineral	Jumlah kebijakan dalam urusan Energi dan sumber Daya mineral	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Energi dan sumber Daya mineral	buah
2	Tersedianya pasokan listrik terhadap seluruh kelurahan	Rasio ketersediaan pasokan listrik terhadap seluruh kelurahan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Energi dan pasokan listrik terhadap seluruh kelurahan	.../....
3	Adanya energi alternatif terbarukan	Jumlah energi alternatif terbarukan dalam setahun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Energi dan Sumber Daya Mineral terkait dengan dukungan penyediaan energi alternatif	buah
4	Meningkatnya jumlah dokumen data / informasi untuk perencanaan pembangunan	Jumlah data/informasi untuk perencanaan pembangunan di bidang energi dan SDA yang	Mengukur kinerja organisasi dalam menyiapkan data/informasi untuk perencanaan pembangunan di bidang	data

	di bidang energi dan SDA yang tersedia	tersedia	energi dan SDA yang tersedia	
<b>XXX</b>	<b>Pariwisata</b>			
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kebijakan dalam urusan Pariwisata</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pariwisata	buah
2	Terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh kembangnya sektor pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah usaha sektor pariwisata.</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pariwisata terkait dengan peningkatan usaha sektor pariwisata	buah
3	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tambahan kontribusi pariwisata terhadap PDRB dalam setahun.</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pariwisata terkait dengan peningkatan PDRB dari usaha sektor pariwisata	buah
4	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah obyek wisata yang memenuhi persyaratan dalam UU terhadap total obyek wisata</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pariwisata dalam menyiapkan obyek wisata yang memenuhi persyaratan	buah
5	Meningkatnya dukungan regulasi, promosi kepariwisataan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah regulasi kepariwisataan yang diterbitkan setahun.</li> <li>Jumlah promosi kepariwisataan yang dilakukan dalam setahun</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pariwisata terkait dengan peningkatan regulasi kepariwisataan	buah
6	Tersedianya SDM yang berkualitas di sektor pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio SDM yang terampil di sektor pariwisata terhadap kebutuhan.</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pariwisata terkait dengan peningkatan promosi kepariwisataan	...../.....
<b>XXXI</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>			
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kebijakan dalam urusan Kelautan dan Perikanan</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kelautan dan perikanan	buah
2	Tersedianya tempat pembudidayaan ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah tempat pembudidayaan ikan</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam tempat pembudidayaan ikan	buah
3	Tersedianya tempat pemasaran ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio ketersediaan tempat pemasaran ikan terhadap kebutuhan tempat pemasaran ikan</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam tempat pemasaran ikan	...../.....
<b>XXXII</b>	<b>Perdagangan</b>			
1	Meningkatnya Jumlah kebijakan dalam urusan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kebijakan dalam urusan Perdagangan</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan perdagangan	buah
2	Terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh kembangnya sektor perdagangan dan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio potensi unggulan daerah yang terekspose pada media nasional terhadap total potensi yang ada</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan perdagangan terkait dengan terekspose potensi unggulan daerah pada media nasional	buah
3	Meningkatnya Jumlah regulasi sektor perdagangan yang diterbitkan dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah regulasi sektor perdagangan yang diterbitkan dalam setahun</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan perdagangan terkait dengan penyusunan regulasi sektor perdagangan	buah
4	Jumlah regulasi sektor jasa yang diterbitkan dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah regulasi sektor jasa yang diterbitkan dalam setahun</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan perdagangan terkait dengan penyusunan regulasi sektor jasa	buah
5	Meningkatnya daya saing sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio UMKM sektor perdagangan terhadap total</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan perdagangan	...../.....

	perdagangan dan jasa	usaha	terkait dengan penyediaan UMKM sektor perdagangan	buah
6	Meningkatnya dukungan regulasi mengenai investasi sektor perdagangan dan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah regulasi mengenai investasi yang diterbitkan dalam setahun.</li> <li>Kontribusi perdagangan dan jasa terhadap PDRB.</li> <li>Rasio ketersediaan SDM yang terampil terhadap total SDM di sektor perdagangan dan jasa.</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan perdagangan terkait dengan penyediaan regulasi mengenai investasi	buah
7	Meningkatnya kontribusi perdagangan dan jasa terhadap PDRB.		Mengukur kinerja organisasi dalam urusan perdagangan terkait dengan peningkatan Kontribusi perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%
8	Tersedianya SDM yang berkualitas di sektor perdagangan dan jasa.		Mengukur kinerja organisasi dalam urusan perdagangan terkait dengan penyediaan SDM di sektor perdagangan dan jasa.	buah
<b>XXXIII</b>	<b>Industri</b>			
1	Meningkatnya jumlah kebijakan dalam urusan Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kebijakan dalam urusan Industri</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Industri	buah
2	Masuknya modal/ industri dari investor luar dan dalam daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah investasi yang masuk dari investor luar dan dalam daerah dalam setahun</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan industri terkait meningkatkan investasi yang masuk dari investor luar dan dalam daerah	buah
3	Meningkatnya jumlah pertambahan industri dari investor luar dan dalam daerah dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pertambahan industri dari investor luar dan dalam daerah dalam setahun</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan industri terkait dengan meningkatkan industri dari investor luar dan dalam daerah	buah
4	Meningkatnya kontribusi industri terhadap PDRB.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan industri dalam meningkatkan kontribusi PDRB dari sektor Industri	%
<b>XXXIV</b>	<b>Ketransmigrasian</b>			
1	Meningkatnya jumlah kebijakan dalam urusan Ketransmigrasian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kebijakan dalam urusan Ketransmigrasian</li> </ul>	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan ketransmigrasian	buah

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS